

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal, karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, populasi penduduk, belanja pegawai, pajak daerah, *human development index (HDI)*) dan jumlah anggota legislatif DPRD terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2010, dari Badan pusat Statistika tahun 2010 dan dari hasil penelitian *Transparency International Indonesia* tentang Indeks Persepsi Korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, ukuran pemerintah daerah, pajak daerah dan jumlah anggota legislatif DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan populasi penduduk, belanja pegawai dan HDI tidak berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, karakteristik pemerintah daerah, anggota legislatif DPRD, korupsi pemerintah daerah.